

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk keempat terbesar di dunia dengan jumlah penduduk berkisar 250 juta jiwa. Banyaknya jumlah penduduk, merupakan bonus demografi bagi Indonesia bila dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Jika tidak, bonus demografi ini bisa menjadi bencana bagi Indonesia. Bonus demografi berarti ketersediaan tenaga kerja yang cukup untuk mendukung lajunya pembangunan Indonesia. Selain sumber daya manusia, Indonesia didukung oleh sumber daya alam yang melimpah. Kombinasi kedua hal ini merupakan modal yang cukup bagi Indonesia untuk terus berkembang dan maju menjadi sebuah bangsa yang makmur.

Bonus demografi berupa sumber daya manusia akan menimbulkan masalah seperti masalah ketenagakerjaan dan pengangguran jika kompetensi yang dimiliki rendah. Kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan yang sulit diperoleh, meningkatnya angka kemiskinan dan tingginya tingkat kriminalitas yang berujung pada gangguan stabilitas keamanan, masalah kekurangan pangan, dan banyak lagi masalah sosial ekonomi lainnya jika sumber daya manusia tidak dikelola dengan baik.

Kualitas sumberdaya manusia Indonesia masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapore dan Filipina. Hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan Indonesia masih rendah dan fasilitas yang tidak memadai, sehingga menyebabkan kualitas tenaga kerja

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masih rendah, pengangguran meningkat, produktivitas menurun serta daya saing rendah dalam menghadapi persaingan diantara tenaga kerja baik dari dalam maupun di luar negeri. Terlebih lagi Indonesia dengan kesembilan negara anggota ASEAN lainnya sudah menandatangani deklarasi persetujuan kerjasama ekonomi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) untuk memulai satu langkah integrasi dalam bidang ekonomi. Hal ini membuat Indonesia harus berusaha memperbaiki kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan jiwa saing tenaga kerja Indonesia agar mampu bertahan di tengah era perdagangan bebas yang akan datang.

Pemerintah Indonesia harus bisa fokus untuk peduli pada masalah tenaga kerja dan segera berbenah untuk menciptakan iklim yang kondusif untuk mempercepat gerakan pertumbuhan ekonomi melalui sumber daya manusia. Pembenahan tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang lebih kita kenal dengan pemberdayaan sumber daya manusia. Pemberdayaan sumber daya manusia ini merupakan bagian dari proses dan tujuan dalam pembangunan nasional.

Kebijakan pemberdayaan sumber daya manusia merupakan kebijakan yang melibatkan banyak sektor diantaranya melalui pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kependudukan, menyediakan fasilitas yang memadai, dan melakukan pelatihan tenaga kerja dan lain sebagainya. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, maka koordinasi antar lembaga pemerintah, maupun antara lembaga-lembaga di masyarakat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia perlu dikembangkan. Masyarakat, termasuk dunia usaha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(swasta), koperasi dan organisasi kemasyarakatan lainnya didorong untuk lebih partisipatif dalam berbagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki sumber daya manusia dan sumber daya alam yang besar. Melihat kondisi geografisnya, Provinsi Riau memiliki letak yang sangat strategis yaitu berada pada jalur perdagangan regional dan internasional di kawasan ASEAN. Provinsi Riau berada pada jalur perkапalan internasional yang sangat sibuk yang menghubungkan Samudera Hindia dengan Laut Cina Selatan dan Samudera Pasifik. Selain itu, Provinsi Riau berdekatan dengan negara-negara tetangga yang memudahkan kegiatan ekspor-impor dan kegiatan perdagangan. Karena potensi geografis inilah Provinsi Riau menjadi daerah potensial bagi kegiatan perekonomian seperti perdagangan dan perindustrian.

Di samping potensi geografisnya yang strategis, Provinsi Riau juga merupakan daerah yang memiliki hasil bumi yang besar. Struktur ekonomi Provinsi Riau didominasi oleh sektor pertambangan yaitu sebesar 51,4% dari total PDRB atau sebesar 46,89 Trilliun. Untuk sektor pertambangan migas menyumbang sebesar 98,4%, sementara pertambangan non migas dan penggalian masing-masing 0,9% dan 0,7%. Sektor perkebunan juga merupakan sektor yang sangat potensial. Pada tahun 2011 saja luas areal kebun kelapa sawit di Provinsi Riau mencapai angka 2,3 juta hektar dan jumlah itu hampir 25 persen luas lahan perkebunan nasional dan CPO yang dihasilkan mencapai 8.198.962 ton per tahun. Untuk menunjang potensi ekonomi yang besar ini, maka kebutuhan akan tenaga kerja ahli dan profesional sangat tinggi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau, sudah tidak diragukan lagi potensinya. Potensi ekonomi ini menjadikan Kota Pekanbaru memiliki daya tarik yang sangat besar, baik bagi investor yang ingin menanamkan modal dan mengembangkan usaha maupun bagi para pencari kerja dari provinsi sekitar Provinsi Riau, bahkan pencari kerja dari negara-negara tetangga.

Banyak orang berdatangan ke Pekanbaru untuk mencari pekerjaan.

Terlebih lagi ketika memasuki era globalisasi dan perdagangan bebas di ASEAN yang dikenal dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tenaga kerja luar bebas untuk masuk ke Pekanbaru. Dengan masuknya tenaga kerja luar daerah ke Pekanbaru, akan mempersempit kesempatan kerja tenaga kerja lokal Pekanbaru untuk bekerja di berbagai sektor. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah daerah sudah membentuk peraturan sebagai bentuk jaminan bagi tenaga kerja lokal Pekanbaru yaitu Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2002 tentang ketenagakerjaan yang menyebutkan setiap investor yang ingin menanamkan modal di Pekanbaru diharuskan menerima tenaga kerja lokal minimal 50 persen dari jumlah yang dibutuhkan. Namun jika mereka tidak memenuhi kualifikasi tetap saja akan kalah bersaing dengan tenaga kerja asing dan pendatang. Tenaga kerja lokal maupun asing harus siap berkompetisi untuk menduduki posisi-posisi strategis pada sektor-sektor ekonomi dan perusahaan-perusahaan swasta dan nasional. Berikut ini adalah data yang menunjukkan pencari kerja di Kota Pekanbaru.

Tabel 1.1
Pencari Kerja yang Terdaftar Tahun 2009 s/d 2013

No	Tahun	Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar	Banyaknya Pencari Kerja yang Ditempatkan	Persentase Penempatan Kerja (%)
1	2009	24.324	2.844	11,69
2	2010	15.392	1.948	12,23
3	2011	5.161	2.231	43,23
4	2012	8.567	5.338	62,31
5	2013	24.689	9.046	36,64
Jumlah		78.673	21.407	27,21

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Pekanbaru tahun 2014

Dari tabel 1.1 dapat diketahui bahwa jumlah pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja kota Pekanbaru dari tahun 2009 sampai tahun 2013 adalah sebanyak 78.673 orang pencari kerja. Dari jumlah sebanyak itu hanya terserap dalam program penempatan kerja sebanyak 27,21% atau sebanyak 20.407 orang. Sisa pencari kerja yang belum terserap seluruhnya yaitu 57.266 orang yang disebabkan oleh adanya kualifikasi penempatan kerja yang tidak terisi atau tidak memenuhi kriteria yang dibutuhkan perusahaan-perusahaan di Pekanbaru serta banyaknya tenaga kerja yang berasal dari luar Pekanbaru yang mengisi lowongan-lowongan pekerjaan di Pekanbaru.

Para pencari kerja yang tidak memenuhi kualifikasi disebabkan kurangnya keterampilan individu yang dibutuhkan perusahaan dan tenaga kerja yang tidak terserap ini berpotensi meningkatkan angka pengangguran di Provinsi Riau, kota Pekanbaru khususnya. Hal ini dapat dilihat angka pengangguran di Kota Pekanbaru memperlihatkan tren yang kurang baik. Seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengutip kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Tabel 1.2
Angka Pengangguran di Kota
Pekanbaru

Tahun	Penduduk	Penduduk Usia Kerja	Angkatan Kerja	Bekerja	Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka(%)
2010	897.768	634.481	435.602	391.047	44.556	10.23
2011	937.939	656.953	421.532	382.185	39.347	9.33
2012	964.558	668.204	408.871	389.921	18.950	4.63
2013	999.031	712.728	442.105	412.711	29.394	6.65
2014	1.055.173	733.640	449.694	408.331	41.363	9.20

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru tahun 2015

Dari data tersebut, angka pengangguran di Pekanbaru mengalami perubahan pasang surut, namun dari tiga tahun terakhir mempelihatkan adanya peningkatan. Angka pengangguran di Provinsi Riau mengalami kenaikan sebesar 2,27 persen pada tahun ini bila dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun 2014. Pada tahun 2015 ini, angka pengangguran di Riau mencapai 7,83%. Demikian disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau. "Pada posisi ini menunjukkan bahwa situasi ketenagakerjaan di Provinsi Riau pada Agustus 2015 menunjukkan arah yang kurang baik," kata Kepala BPS Provinsi Riau, Mawardi Arsal, dalam keterangannya di Pekanbaru, Sabtu (7/11/2015). (Potretnews.com)

Menanggapi permasalahan tersebut Pemerintah Provinsi Riau dengan APBN dan APBD Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan, melalui Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPT-LK), memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada tenaga kerja lokal Pekanbaru untuk mengikuti pelatihan keterampilan dan peningkatan kemampuan tenaga kerja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Pemerintah Provinsi Riau, Balai Pelatihan Tenaga Kerja Provinsi Riau (BPTK) diubah menjadi Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPT-LK) Provinsi Riau yang merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau.

Tenaga kerja yang mengikuti kegiatan pelatihan berbasis kompetensi Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas (PKTKP) di Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPT-LK) Wilayah I Pekanbaru akan mendapatkan materi pelatihan sesuai dengan minat dan bakat mereka. Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPT-LK) Wilayah I Pekanbaru menyediakan sembilan jurusan dengan total 30 bidang keahlian atau sub jurusan. Masing-masing kelas akan diisi oleh 16 orang peserta latih. Satu jurusan bisa terdiri atas satu kelas atau lebih tergantung dari paket pelatihan. Dengan mengikuti pelatihan di Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPT-LK) Wilayah I Pekanbaru, peserta akan mendapat berbagai macam fasilitas seperti biaya pelatihan gratis, baju seragam, konsumsi makan siang, uang transportasi dan banyak keuntungan lainnya.

Namun dengan berbagai keuntungan yang ditawarkan, pelaksanaan kegiatan pelatihan di Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPT-LK) Wilayah I Pekanbaru tidak berjalan dengan maksimal. Misalnya pada tahun 2014, pelatihan hanya dibuka untuk 14 jurusan dan 15 jurusan pada tahun 2015 dari total 30 jurusan yang ada. Selain itu, persentase peserta yang ditempatkan atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bekerja setelah mengikuti pelatihan kurang dari 50%. Pada tahun 2014 persentase penempatan adalah 21,4% dan 19,8% pada tahun 2015. Informasi ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.3
Jumlah Penempatan dan Peserta Pelatihan di UPT-LK Wilayah I
Pekanbaru Disnakertransduk Provinsi Riau

No	Jurusan	Sub Jurusan	2014				2015			
			APBD		APBN		APBD		APBN	
			Peserta	penempatan	peserta	penempatan	peserta	Penempatan	peserta	Penempatan
1	Teknologi Mekanik	Mesin produksi	16	5	0	0	16	0	0	0
		Las listrik/las industri	0	0	16	3	16	0	32	16
		Las karbit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Auto Motive	Mobil diesel	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mobil bensin	16	2	0	0	16	0	0	0
		Teknik sepeda motor	16	2	16	5	32	0	64	32
3	Listrik	Instalasi listrik	0	0	0	0	16	0	48	31
		Teknik pendingin	16	4	0	0	0	0	0	0
		Elektronika/audio video	0	0	16	6	16	0	0	0
		T. Hp/ Telekomunikasi	16	3	16	2	16	0	0	0
4	Teknologi Informasi Tika	Teknisi komputer	0	0	0	0	0	0	0	0
		Operator komputer/office tools	16	2	16	3	16	0	48	30
		Multimedia	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Bangunan	Tukang kayu	0	0	0	0	0	0	0	0
		Tukang batu	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meubeler/furniture	0	0	0	0	16	0	32	0
6	Tata Niaga	Sekretaris	16	1	16	2	16	0	0	0
		Bahasa inggris	0	0	0	0	0	0	0	0
		Administrasi kantor	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Aneka Kejuruan	Menjahit	16	2	16	4	32	0	64	8
		Teknik bordir	16	1	16	2	32	0	0	0
		Baby sitter	0	0	0	0	0	0	0	0
		Rias pengantin	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Pertanian	Perikanan darat/budidaya	0	0	16	3	0	0	0	0
		Processing/pengolahan hasil pertanian	0	0	16	6	16	0	48	13
		Peternakan unggas	0	0	0	0	16	0	0	0
9	Pariwisata	Tata boga/perhotelan	16	1	16	13	48	0	0	0
		Tata graha	0	0	0	0	0	0	0	0
		Front office	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah			160	23	176	49	320	0	336	130

Sumber: UPT-LK Provinsi Riau Wilayah 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dari data di atas dapat dilihat pelatihan tidak dilakukan pada semua jurusan yang disediakan, kemudian penempatan peserta pelatihan yang merupakan bagian dari tahap evaluasi pelaksanaan kegiatan pelatihan masih menunjukkan hasil yang kurang maksimal. Hal ini terbukti dengan 336 orang peserta yang dilatih pada tahun 2014 menggunakan dana APBN dan APBD, hanya 76 orang yang berhasil ditempatkan. Pada tahun 2015 kondisi ini tidak menjadi lebih baik. Dari 656 peserta pelatihan hanya 130 orang saja yang berhasil ditempatkan.

Jumlah peserta dan penempatan yang diperoleh oleh peneliti seperti yang di atas, merupakan hasil dari sebuah proses. Sebelum adanya peserta dan kemudian peserta pelatihan mulai ditempatkan pada lapangan pekerjaan tertentu, tentunya ada proses yang mengawalinya. Seperti yang dikatakan oleh Cardoso Gomes (2003:204) terdapat 3 tahap utama dalam pelatihan yaitu penentuan kebutuhan pelatihan, mendesain program pelatihan, dan evaluasi efektivitas program pelatihan. Tiga tahap dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan ini akan menentukan seberapa banyak peserta pelatihan, keefektifan metode pelatihan, serta hasil evaluasi dari kegiatan pelatihan.

Kondisi seperti yang dijelaskan di atas menjadi bahan pertanyaan bagi peneliti. Apa yang menyebabkan tidak dibukanya semua jurusan dan penempatan peserta yang belum maksimal pada program pelatihan pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UPT-LK Wilayah I di Pekanbaru. Tentunya keadaan tersebut saling berkaitan dengan proses awal pelatihan.

Menurut Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Riau, Ruzaini, kurangnya sosialisasi dari BLK dalam memperkenalkan kursus-kursus disediakan menjadi faktor utama mengapa tempat latihan kerja ini kurang diminati warga. Padahal sesuai tujuannya, BLK sangat dibutuhkan kehadirannya oleh masyarakat. "Selama setahun ini, BLK rasanya memang kurang mempromosikan kursus-kursus bisa diikuti masyarakat. Padahal kita yakin kalau warga sangat membutuhkan kehadiran BLK. Minat masyarakat besar, tapi tidak tahu hendak kemana. Seperti itulah kira-kira," kata Ruzaini (Riau Online, 4 Agustus 2016)

Untuk mengimbangi perkembangan ekonomi dan persaingan yang diprediksi akan semakin ketat pada era perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi Asean, Pemerintah Pekanbaru harus mampu menyelesaikan persoalan mengenai ketenagakerjaan dengan mencetak tenaga kerja yang berkualitas, terampil dan profesional. Pemberdayaan dan peningkatan kualitas tenaga kerja lokal di Pekanbaru dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya memberikan fasilitas pemberdayaan dengan memberikan berbagai macam pelatihan untuk meningkatkan kemampuan para pencari kerja.

Di samping beberapa kriteria tenaga kerja yang ketat, era globalisasi juga membutuhkan tenaga kerja dengan multi skil. Dengan demikian, tantangan yang dihadapi dimasa mendatang dan dewasa ini adalah bagaimana

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menciptakan, membina dan memberdayakan tenaga kerja yang begitu banyak untuk menangani pertumbuhan industri di Provinsi Riau yang sangat cepat, maka Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja merupakan salah satu lembaga pendidikan dan pelatihan untuk mempersiapkan hal tersebut.

Berdasarkan data dan gejala-gejala di atas serta pentingnya peran Dinas Tenaga Kerja melalui Balai Latihan Kerja dalam memberdayakan tenaga kerja lokal di Kota Pekanbaru melalui pemberian kegiatan pelatihan, maka penulis tertarik meneliti tentang **“Analisis Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Kerja Lokal Kota Pekanbaru pada Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPT-LK) Wilayah I Pekanbaru Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau.”**

1.2 Rumusan Masalah

Sehubungan dengan permasalahan yang telah dipaparkan di awal, yang menjadi rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pelatihan tenaga kerja lokal pada Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPT-LK) Wilayah I Pekanbaru Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau?
2. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan pelatihan tenaga kerja pada Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPT-LK) Wilayah I Pekanbaru Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pelatihan tenaga kerja lokal Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPT-LK) Wilayah I Pekanbaru Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan program pelatihan pada Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPT-LK) Wilayah I Pekanbaru Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bahan informasi bagi para pencari kerja di kota Pekanbaru tentang adanya program pelatihan guna meningkatkan kualitas tenaga kerja oleh pemerintah kota Pekanbaru.
2. Bahan informasi bagi para peneliti berikutnya yang mengambil masalah yang sama.
3. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Strata Satu (S1) pada Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dari penulisan ini, menulis membaginya kedalam enam bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan dengan pembahasan masalah yang diteliti.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dijelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel dan analisa data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini penulis menjelaskan kondisi geografis, gambaran umum wilayah, dan struktur organisasi lokasi penelitian

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Didalam bab ini memuat hasil dari penelitian dan pembahasan.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup, yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan